



INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PEKUNDEN KABUPATEN BANYUMAS

Dwi Maryanti¹, Indah Ayu Permana Pribadi², Zaula Rizqi Atika³, Chamid Sutikno⁴, Ariesta Amanda⁵

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email: maryantidwi2026@gmail.com¹, ap.pribadi@unupurwokerto.ac.id²,

zr.atika@unupurwokerto.ac.id³, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id⁴,

ariestaamanda92@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata pekunden di Kabupaten Banyumas. Desa ini dikembangkan sebagai Desa Wisata berbasis edukasi kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal seperti Kampoeng Nopia Mino, Oemah Batik, dan Oemah Gamelan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan utama seperti Kepala Desa, Pengelola Pokdarwis, dan pelaku UMKM. Analisis data mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat Michael Douglass yang meliputi tiga aspek: *input*, proses, dan *output*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Pemberdayaan di Desa Pekunden berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Faktor pendukung utama meliputi peran aktif pemerintah desa, sinergi antar pemangku kepentingan, dan pemanfaatan media digital untuk promosi. Hambatan yang dihadapi adalah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan resisten terhadap perubahan. Kesimpulannya, pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Kata kunci: Inovasi, Pemberdayaan masyarakat, Desa Wisata, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze innovative forms of community empowerment through the development of Pekunden Tourism Village in Banyumas Regency. This village was developed as a creative education-based tourism village, utilizing local potential such as Kampoeng Nopia Mino, Oemah Batik, and Oemah Gamelan. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation with key informants such as the Village Head, Pokdarwis Managers, and MSMEs. Data analysis refers to Michael Douglass's theory of community empowerment, which encompasses three aspects: input, process, and output. The results show that the empowerment innovation in Pekunden Village successfully stimulated local economic growth, preserved cultural heritage, and increased active community participation in tourism destination management. Key supporting factors include the active role of the village government, synergy between stakeholders, and the use of digital media for promotion. Obstacles faced were the community's traditional mindset and resistance to change. In conclusion, integrated tourism village development involving community participation can be an effective strategy for improving the welfare and independence of village communities.

Keywords : Innovation, Community Empowerment, Tourism Village, Community Participation

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu model pembangunan yang berfokus pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pancasila, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara merata dan adil, serta mendorong perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang lebih maju dan demokratis. Pembangunan nasional di Indonesia sangat terintegrasi dengan pembangunan desa. Pembangunan desa ini dianggap bagian penting dari pembangunan nasional karena desa merupakan basis ekonomi, politik, sosial, budaya

dan pertahanan keamanan nasional. Pembangunan desa difokuskan untuk memperkuat wilayah-wilayah dan desa sebagai bagian dari negara kesatuan, serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan desa membutuhkan peran aktif dari masyarakat agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, karena pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat menjadi dua konsep yang saling berkaitan dan berdampak positif satu sama lain (Setiawan, 2019).

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal (1) ayat (12), pemberdayaan masyarakat desa di definisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Bidi et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Istiyanti, 2020).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan, sehingga pembangunan dapat lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melalui inovasi (Sofianto, 2020). Inovasi adalah ide, gagasan, praktik, atau objek baru yang disadari dan diterima seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Rogers, 1983). Selain itu, inovasi juga merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, atau rekayasa guna mengembangkan penerapan praktis ilmu pengetahuan baru serta cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke dalam produk atau proses produksi (Setiawan & Ikbali, 2019).

Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan, baik dalam konteks bisnis, teknologi, maupun sosial (Auliah et al., 2022). Salah satu bentuk inovasi sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat desa (Marzuki, 2016). Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada di lingkungan masyarakat tersebut (Setiadi & Pradana, 2022). Sumber daya lokal merupakan suatu aset dimiliki oleh desa dalam mencapai pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera dan makmur (Mardhika, 2023). Potensi dan warisan budaya lokal seharusnya dijadikan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Utami, 2020). Sumber daya lokal terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial (Purnawansyah et al., 2021). Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai pemberdayaan masyarakat dapat berupa pengembangan desa wisata (Setiadi & Pradana, 2022).

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat (Afriza et al., 2020). Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), perkembangan desa wisata di Indonesia dimulai pada tahun

2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut data perkembangan desa wisata di Indonesia tiap tahunnya:

Tabel 1. Data Perkembangan Desa Wisata Indonesia Tiap Tahun

Tahun	Jumlah
2021	1.831
2022	3.419
2023	4.674
2024	4.812

Sumber. (Kemenparekraf, 2024)

Kemenparekraf/Baparekraf juga melaksanakan program Sadar Wisata 5.0 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mentalitas, dan karakter produktif masyarakat desa. Program ini dirancang agar masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan potensi desa wisata secara mandiri dan berkelanjutan (kemenparekraf, 2024). Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya serta potensi pariwisata daerah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Pembentukan desa wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada pengalaman interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat setempat (Nurhajati, 2018).

Desa wisata merupakan salah satu potensi pariwisata di Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru pada awal tahun 2023, Jawa Tengah memiliki 776 desa wisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Disporapar Provinsi Jawa Tengah, memiliki berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan desa wisata. Program tersebut meliputi sosialisasi, workshop, Gelar Desa Wisata, dan bantuan keuangan. Dukungan ini selaras dengan 10 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif (jatengprov, 2023). Pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Banyumas hingga saat ini terbilang cukup baik. Dari 301 Desa yang ada di Kabupaten Banyumas, sebanyak 21 Desa saat ini berstatus sebagai desa wisata. Adapun Desa Wisata tersebut yaitu:

Tabel 2 . Daftar Desa Wisata Di Kabupaten Banyumas Hingga Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan
1	Cikakak	Wangon
2	Kalisalak	Kebasen
3	Karangsalam	Baturraden
4	Karagtengah	Cilongok
5	Melung	Kedungbanteng
6	Darmakradenan	Ajibarang
7	Petahunan	Pekuncen
8	Banjarpanepen	Sumpiuh
9	Karangkemiri	Karanglewas
10	Samudra	Gumelar
11	Karanggintung	Kemranjen
12	Kalibagor	Kalibagor
13	Cirahab	Lumbir
14	Kemutung Lor	Baturraden

Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Pekunden Kabupaten Banyumas

15	Pekunden	Banyumas
16	Kejawar	Banyumas
17	Tamansari	Karanglewas
18	Pekuncen	Jatilawang
19	Tambaknegara	Rawalo
20	Glempang	Pekuncen
21	Gerduren	Purwojati

Sumber. (radarbanyumas, 2023)

Keberadaan 21 desa wisata yang telah terbentuk saat ini menawarkan berbagai alternatif destinasi wisata di Kabupaten Banyumas. Desa wisata ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar aktivitas wisata di desa-desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan memungkinkan masyarakat di Kabupaten Banyumas dapat merasakan manfaat dari keberadaan desa wisata tersebut. Adapun Desa Wisata yang memiliki beberapa unggulan berbasis budaya, sejarah, dan edukasi di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas yaitu Desa Wisata pekunden dan Pesona Kejawar. Berikut data desa wisata di Kecamatan Banyumas dan sekitarnya: Desa Wisata Pekunden dengan berbasis budaya dan edukasi seperti kampoeng Nopia, Kebun buah naga, dan Oemah gamelan.

Kedua Desa Wisata Pesona kejawar dengan wisata sejarah dan budaya seperti Djagonagn Koena, nuansa tempo dulu, rumah adat joglo, dan tradisi perang kupat (sumber: dolanbanyumas.banyumaskab.go.id). Keunikan yang dimiliki Desa Wisata Pekunden yang membedakan dari Desa Wisata lain adalah desa Pekunden merupakan sebuah desa wisata berbasis edukasi kreatif dengan menyediakan 25 *homestay* yang tersebar di beberapa berbagai tempat sehingga menjadi daya tarik wisata di desa Pekunden. Bukan hanya itu, Desa Wisata Pekunden juga meraih penghargaan seperti mendapat kategori Desa Wisata Rintisan dan mendapat juara 1 gelar Desa Wisata Jateng 2022, serta masuk dalam 75 besar Desa Wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. Desa wisata ini memiliki kurang beberapa jenis potensi wisata yang menjadi daya tarik, antara lain:

Tabel 3. Potensi daya tarik di desa wisata Pekunden

No.	Potensi Wisata
1.	Kampoeng nopia mino
2.	Oemah batik
3.	Oemah gamelan
4.	Kebun Buah Naga
5.	Oemah Manggleng
6.	Kampung Tani
7.	Agro Dewi Denmas
8.	Kampung Garment
9.	Event Tahunan

Sumber: (instagram deswita_pekunden, 2024)

Kampung nopia mino tersebut yang menjadi daya tarik dalam desa wisata ini, karena proses pembuatan nopia yang unik dan para pengunjung dapat melihat secara langsung proses pembuatannya. Desa Wisata Pekunden ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wisanggeni dengan tagline “Kuncara” yang berarti terkenal.

Pemerintah Desa dan pokdarwis bekerja sama untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Pekunden. Salah satunya yang terbaru berupa Kembang Tani yang akan diresmikan pada tahun 2024 ini. Bukan hanya itu, untuk mengembangkan desa wisata Pekunden tersebut pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas membuat pola perjalanan atau *travel pattern* untuk menghubungkan sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Sejak di resmikannya Desa Wisata Pekunden pada 19 Desember 2021 oleh Bapak Bupati Jawa Tengah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat karena meningkatkan penghasilan masyarakat dan nilai kualitas Desa Pekunden.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti memilih desa wisata Pekunden sebagai tempat penelitian karena memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa wisata lainnya di Kabupaten Banyumas. Penulis mengambil judul penelitian “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Wisata di Desa Pekunden Kabupaten Banyumas” yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Pekunden dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Michael Douglass yang meliputi aspek input, proses, dan output.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati (Murdiyanto, 2020). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Pekunden, yaitu Kepala Desa, Kaur Kesejahteraan, Ketua Pokdarwis, dan pemilik UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan *Purposeive Sampling*. *Purposeive Sampling* menurut Creswell (2013) merupakan alat untuk memilih peserta yang paling relevan dan informatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer (wawancara langsung dengan informan) dan data sekunder (dokumen, artikel, dan laporan terkait). Fokus penelitian ini adalah inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dianalisis menggunakan tiga aspek teori Michael Douglass yaitu aspek input yang berupa pelatihan SDM dan fasilitas, aspek proses yang berupa partisipasi aktif dan kemitraan, aspek output yang berupa indikator keberhasilan dan pengukuran dampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Desa Wisata Pekunden merupakan upaya strategis untuk memajukan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa Pekunden menyatakan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Michael Douglass yang menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspek input, proses, dan output untuk memajukan sumber daya manusia dan alam. Kaur Kesejahteraan menambahkan bahwa pemanfaatan sumber daya secara optimal memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Pengembangan ini juga

didasari oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Pengembangan Desa Wisata memerlukan dukungan kelembagaan ekonomi desa yang kuat. Penelitian Sutikno et al. (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik melalui fungsi perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta pendapatan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi desa wisata dapat berkembang optimal apabila mendapat dukungan oleh tata kelola BUMDes yang partisipatif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi upaya yang memberikan kekuatan atau daya bagi masyarakat sehingga dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan bersandar pada kemampuan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa sendiri (Endah, 2020).

Inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Pekunden, Kabupaten Banyumas, telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pendekatan ini memberdayakan penduduk lokal dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam setempat, seperti Kampung Nopia-Mino, Oemah Gamelan, dan Oemah Batik, yang menjadi daya tarik wisatawan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kohesi sosial komunitas.

Menurut teori pembangunan komunitas yang dikemukakan oleh Michael Douglas, keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Di Desa Pekunden, prinsip ini diterapkan melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Pokdarwis berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pekunden di Banyumas ini dengan mengelola dan mengembangkan potensi desa menjadi destinasi wisata kreatif. Meskipun desa ini memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam, Pokdarwis berhasil menghadirkan paket wisata edukasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang terdiri dari partisipasi masyarakat, pemberdayaan lokal, pengelolaan sumber daya dan bersifat berkelanjutan ini sejalan dengan konsep Douglas, di mana pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada inisiatif dan kapasitas lokal, sehingga hasilnya lebih relevan dan berkelanjutan bagi komunitas setempat.

Konsep Douglas yang menjadi dasar keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdiri dari aspek input, aspek proses dan aspek output. Aspek input merupakan aspek yang berisi sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan desa wisata. Aspek input dapat berupa sumber daya manusia yang terdiri dari masyarakat lokal, pemerintah dan stakeholders lainnya. Kemudian sumber daya alam yang terdiri dari lingkungan, budaya dan tradisi lokal, serta sumber daya keuangan seperti pendanaan untuk mengembangkan desa wisata. Aspek proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata seperti perencanaan dan pengembangan desa wisata, pelatihan dan peningkatan kemampuan masyarakat lokal, serta pemasaran dan promosi desa wisata. Aspek output adalah hasil yang diperoleh dari pengembangan desa wisata seperti peningkatan pendapatan masyarakat lokal, kesediaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat setempat.

Aspek Input

Pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan melalui koordinasi yang terstruktur antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pelaku usaha lokal.

Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan Desa Wisata Pekunden untuk memaksimalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi secara bersamaan. Dengan pengelolaan yang baik, desa ini tidak hanya mampu meningkatkan jumlah wisatawan tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan identitas lokal yang berkelanjutan. Aspek ini sejalan dengan penelitian (Pebriyani & Hermawan, 2021) bahwa pada penelitian yang berjudul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtawangungan Kecamatan Sindangagung kabupaten Kuningan ini sudah mengoptimalkan program pemberdayaan dengan memberikan anggaran pemberdayaan agar lebih maksimal dan pemerintah desa juga memiliki kerjasama yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat sehingga saling bermanfaat satu dengan yang lainnya.

Pelatihan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) aspek input dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Michael Douglass menentukan pentingnya kesiapan sumber daya sebagai fondasi awal keberhasilan suatu program pembangunan. Sumber Daya tersebut terutama meliputi kapasitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas, serta kesediaan modal dan informasi. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Pekunden, pelatihan Sumber Daya Manusia menjadi komponen utama dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pekunden, Kaur Kesejahteraan Desa, dan ketua Pokdarwis, diketahui bahwa pemerintah desa secara aktif menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan bagi masyarakat, khususnya yang terlibat langsung dalam kegiatan Desa Wisata. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan pengelolaan *homestay*, pelayanan wisata (*hospitality*), pengemasan produk UMKM, pengelolaan kuliner lokal, serta pelatihan promosi berbasis media digital. Kepala Desa Pekunden menyatakan bahwa: “Pelatihan kami lakukan supaya masyarakat tidak hanya ikut-ikutan, tetapi benar-benar paham bagaimana mengelola wisata, melayani tamu, dan mengembangkan usahanya sendiri”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan SDM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Douglass yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan peningkatan kapasitas manusia agar masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek (Douglass, 1984).

Ketua Pokdarwis Pekunden juga menegaskan bahwa pelatihan menjadi kebutuhan penting mengingat sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memiliki pengalaman dalam bidang pariwisata. Oleh karena itu, pelatihan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat mampu mengelola potensi desa secara profesional. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Istiyanti (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal, terutama dalam peningkatan kemampuan manajerial dan pelayanan wisata. Jika dibandingkan dengan penelitian Pebriyani dan Hermawan (2021), pelatihan SDM di Desa Pekunden menunjukkan kesamaan pola, yaitu adanya peran aktif pemerintah desa dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pelatihan. Di Desa Pekunden, pelatihan lebih diarahkan pada pengembangan wisata berbasis edukasi kreatif dan pemanfaatan potensi budaya lokal, sedangkan pada penelitian sebelumnya pelatihan lebih menitikberatkan pada aspek administrasi dan kelembagaan. Dengan demikian, pelatihan SDM di Desa Wisata Pekunden dapat dinilai telah mendukung aspek input secara optimal karena mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola Desa Wisata secara berkelanjutan.

Fasilitas pendukung pengembangan Desa Wisata selain pelatihan SDM, aspek input dalam pengembangan Desa Wisata Pekunden juga didukung oleh penyediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup infrastruktur fisik maupun nonfisik yang menunjang aktivitas wisata dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa secara bertahap menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum seperti akses jalan, sanitasi, sarana kebersihan, *homestay*, serta fasilitas pendukung kegiatan wisata edukatif. Kaur Kesejahteraan Desa Pekunden menyampaikan bahwa: “Fasilitas kami siapkan supaya wisatawan merasa nyaman, dan masyarakat juga terbantu dalam menjalankan kegiatan usaha wisatanya”. Penyediaan fasilitas ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan Desa Wisata. Menurut Michael Douglass, kesediaan fasilitas merupakan bagian penting dari input karena berfungsi sebagai sarana pendukung agar proses pemberdayaan dapat berjalan efektif dan menghasilkan output yang optimal (Douglass, 1984). Selain fasilitas fisik, Desa Wisata Pekunden juga memanfaatkan fasilitas digital sebagai bagian dari inovasi input, seperti penggunaan media sosial dan platform daring untuk promosi wisata dan produk UMKM.

Pemanfaatan fasilitas digital ini memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing Desa Wisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Auliah et.al (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan fasilitas digital menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di era modern. Jika dibandingkan dengan penelitian Fikri dan Septiawan (2020), penyediaan fasilitas di Desa Pekunden dinilai lebih partisipatif karena melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Hal ini berbeda dengan beberapa Desa Wisata lain yang masih bergantung sepenuhnya pada pemerintah desa tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, fasilitas yang tersedia di Desa Wisata Pekunden tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang wisata, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan produktif. Ketersediaan fasilitas yang didukung oleh pelatihan SDM menunjukkan bahwa aspek input dalam pengembangan Desa wisata Pekunden telah berjalan selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Michael Douglass.

Aspek Proses

Partisipasi aktif dan kemitraan aspek proses dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Michael Douglass menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan terbangunnya kemitraan antara berbagai aktor sebagai inti dari keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Proses pemberdayaan tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga dari bagaimana masyarakat dilibatkan secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Pekunden, aspek proses diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat serta kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Pekunden, Kaur kesejahteraan Desa, dan Ketua Pokdarwis diketahui bahwa, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pekunden dilakukan sejak tahap perencanaan. Pemerintah Desa membuka ruang musyawarah desa sebagai forum utama bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, serta aspirasi terkait pengembangan potensi wisata. Kepala Desa Pekunden menyatakan bahwa: “Setiap program Desa Wisata selalu kami musyawarahkan bersama masyarakat supaya yang dijalankan sesuai kebutuhan dan

masyarakat merasa memiliki”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, sehingga tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program Desa Wisata. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Douglass yang menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan syarat utama agar proses pemberdayaan berjalan berkelanjutan dan tidak bersifat *top-down* (Douglass, 1984).

Partisipasi aktif masyarakat juga terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan Desa Wisata seperti pengelolaan *homestay*, penyelenggaraan paket wisata edukasi, pengelolaan UMKM, serta pelestarian seni dan budaya lokal. Ketua Pokdarwis Pekunden menjelaskan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam operasional Desa Wisata sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Istiyanti (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan wisata mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pengembangan desa wisata membutuhkan tata kelola kelembagaan desa yang adaptif dan inovatif. Sutikno et al. (2022) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan bentuk *public enterprise* yang bergerak dari paradigma birokratik menuju bisnis sosial sehingga mampu mengoptimalkan potensi desa secara partisipatif. Konsep tersebut relevan dengan pengembangan Desa Wisata Pekunden yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain partisipasi aktif, aspek proses dalam pengembangan Desa Wisata Pekunden juga ditandai dengan adanya kemitraan antara pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, serta pihak eksternal seperti dinas terkait dan lembaga pendukung. Kaur kesejahteraan Desa Pekunden menyampaikan bahwa kemitraan ini dibangun untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendampingan, pelatihan, dan dukungan promosi. Kemitraan tersebut memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan sumber daya yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Dan dan desa (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan Desa Wisata sangat dipengaruhi oleh dinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jika dibandingkan dengan penelitian Pebriyani dan hermawan (2021), kemitraan di Desa Wisata Pekunden menunjukkan kesamaan dalam hal peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat partisipasi masyarakat yang relatif lebih intens di Desa Pekunden, dimana masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Desa Wisata Pekunden cenderung lebih partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, aspek proses dan pengembangan Desa Wisata Pekunden telah berjalan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat Michael Douglass, dimana partisipasi aktif dan kemitraan menjadi kunci utama dalam mendorong keberlanjutan program. Proses yang partisipatif dan berbasis kemitraan ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan Desa Wisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Aspek Output

Indikator Keberhasilan dan Pengukuran Dampak Aspek output dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Michael Douglass menekankan pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai ukuran keberhasilan suatu program pembangunan. Output tidak hanya dipahami sebagai capaian jangka pendek, tetapi juga sebagai dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Dalam konteks

pengembangan Desa Wisata Pekunden, aspek output diukur melalui indikator keberhasilan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pekunden, Kaur Kesejahteraan Desa, Ketua Pokdarwis, dan pelaku UMKM, diketahui bahwa keberadaan Desa Wisata Pekunden memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa wisata mengalami peningkatan pendapatan melalui usaha homestay, kuliner lokal, kerajinan tangan, serta jasa pendukung wisata lainnya. Kepala Desa Pekunden menyampaikan bahwa: “Sejak adanya desa wisata, masyarakat yang terlibat merasakan tambahan penghasilan, terutama dari homestay dan usaha kuliner.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan utama dari program desa wisata adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, yang sejalan dengan pandangan Douglass bahwa pemberdayaan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata (Douglass, 1984). Selain indikator ekonomi, aspek output juga tercermin dari dampak sosial berupa meningkatnya kesadaran, kepercayaan diri, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Pengembangan Desa Wisata Pekunden tidak hanya membutuhkan potensi wisata yang menarik, tetapi juga kelembagaan masyarakat yang aktif. Hidayat et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat melalui Pokdarwis dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, promosi digital, serta koordinasi antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan BUMDes. Model pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Ketua Pokdarwis Pekunden menjelaskan bahwa masyarakat kini lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata, serta memiliki rasa bangga terhadap potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suminar yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan. Pengukuran dampak dari pengembangan Desa Wisata Pekunden juga dapat dilihat melalui berkembangnya jumlah dan jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa tersebut. Kaur Kesejahteraan Desa menyampaikan bahwa semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk membuka atau mengembangkan usaha setelah bergabung dalam desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa desa wisata berperan sebagai stimulus ekonomi lokal yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi tradisional.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Journal et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengembangan desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara signifikan. Jika dibandingkan dengan penelitian Istiyanti (2020) tentang pengembangan Desa Wisata Sukawening, hasil penelitian di Desa Pekunden menunjukkan kesamaan pada indikator keberhasilan berupa peningkatan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada penguatan aspek budaya sebagai bagian dari output. Di Desa Pekunden, pelestarian budaya lokal seperti seni gamelan, batik, dan kuliner tradisional tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber pendapatan masyarakat. Hal ini memperkuat pendapat Douglass bahwa output pembangunan yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara seimbang. Dengan demikian,

aspek output dalam pengembangan Desa Wisata Pekunden menunjukkan bahwa inovasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan telah menghasilkan dampak positif yang terukur, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Indikator keberhasilan berupa peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta terjaganya identitas budaya lokal menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pekunden telah berjalan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat Michael Douglass dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengembangan Desa Wisata Pekunden, dapat disimpulkan bahwa inovasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan secara terstruktur dan memberikan dampak positif yang signifikan. Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Michael Douglass, yang menekankan pentingnya tiga aspek utama: input, proses, dan output.

1. Aspek Input menunjukkan kesiapan yang matang, ditandai dengan pelatihan sumber daya manusia yang intensif dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membangun kemandirian masyarakat, sementara fasilitas fisik dan digital yang tersedia berfungsi ganda sebagai sarana penunjang wisata sekaligus alat pemberdayaan.
2. Aspek Proses mencerminkan pelaksanaan yang partisipatif dan kolaboratif. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta terbangunnya kemitraan yang solid antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pelaku usaha, menjadi kunci utama yang membuat program berkelanjutan dan tidak bersifat top-down.
3. Aspek Output membuktikan adanya dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan pendapatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan homestay, penguatan identitas budaya dan kohesi sosial, serta meningkatnya kesadaran, kepercayaan diri, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa.

Secara keseluruhan, pengembangan Desa Wisata Pekunden membuktikan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam lokal secara optimal mampu mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Keberhasilan ini menegaskan bahwa sinergi antara kesiapan input, proses yang partisipatif, dan output yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan relevan bagi komunitas setempat.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan pelatihan digital marketing agar promosi desa wisata menjadi lebih luas, memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, toilet, dan area parkir untuk kenyamanan wisatawan.
2. Bagi Pokdarwis, mengembangkan paket wisata baru agar lebih beragam serta melibatkan generasi muda dan perempuan lebih aktif dalam pengelolaan wisata.
3. Bagi Masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan desa wisata, menjaga kebersihan dan kelestarian budaya lokal.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten, memberikan bantuan modal dan pelatihan rutin untuk pelaku UMKM di desa wisata serta memasukan Desa Pekunden dalam program promosi wisata daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Nomor 1).
- Rochmaniah, A. (2020). Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. In Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>

Jurnal

- Afriza, L., Darmawan, H., Riyanti, A., Tinggi, S., Pariwisata, I. E., & Bandung, P. (2020). Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat. In *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* (Vol. 5, Nomor 3).
- Alamsyah, A. (2022). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
- Auliah, I., Selitung, M., & Syafri, S. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 09–14. <https://doi.org/10.35965/ursj.v5i1.1961>
- Bidi, M. A., Tokan, F. B., & Medho, Y. F. (2024). Hegemoni Kekuasaan Dalam Paradigma Politik Pemberdayaan Lokal Kain Tenun Di Kabupaten Ende. *Jurnal Education and development*, 12(2), 27–34. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5577>
- Doli Tua Mulia Raja Panjaitan & Piki, & Pardede, D. K. (2021). Administrasi Publik. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 9.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Kasmini H, O. W., Raharjo, B. B., Nugroho, E., & Hermawati, B. (2017). Sumber Daya Lokal Sebagai Dasar Perencanaan Program Gizi Daerah Urban. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i1.1575>
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 465–477.
- Kurniawan, H., Yulianto, Y., Setiawan, R., Mladenov, S. V., & M. Ardiansyah, M. A. (2023). Sustainable Development Through Community Empowerment Based On Local Wisdom. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 41(2), 164. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v41i2.5719>
- Kurniawan, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Industri Kreatif Melalui Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*.
- Kusiawati, D. (2017). Pendidikan Luar Sekolah , Universitas Pendidikan Indonesia

- Pendidikan Luar Sekolah , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Malang. Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 59–72.
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 87–94. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>
- Marzuki, M. (2016). Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 11. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.146>
- Muluk, M. R. K. (2020). Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik. Pustaka.Ut.Ac.Id, 1–47.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press.
- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Pattaray, A. (2021). Wisata Petualangan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Desa Wisata Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2247–2254.
- Pebriyani, D., & Hermawan, E. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*, 1(3), 197–206.
- Purnawansyah, Hayati, L. N., Supriyadi, M. I., Anugrah, R., & Nasir, M. (2021). Optimasi Web Sumber Daya Lokal untuk Pengembangan Potensi Desa pada Lembang Marinding Desa Kandora. *Ilmu Komputer untuk Masyarakat (ILKOMAS)*, 2(2), 35–42.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 1–11.
- Rachman, D. R. N., Roziqin, A., & Salahudin, S. (2022). Community Empowerment Based on Local Potential: a Systematic Literature Review. *Dia*, 20(01), 299–316. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6472>
- Rizqi Toyibah, Happy Sista Devy, M. Sultan Mubarak, Ade Dedi Rohayana, Ali Muhtarom, Tamamudin, Marotina, N., Fadillah Syaufii, F., & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Community Empowerment Based on Local Potentials Through the Creation of “Cassava Nugget” Products in Dukuh Binangun, Werdi Village, Paninggaran District. *International Journal Of Community Service*, 1(1), 17–27. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i1.7>
- Rochmaniah, A. (2020). Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. In Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusions of Innovations* Fourth Edition. The Free Pers.
- Rusmaningsih, P. N. (2023). JPSI (Journal of Public Sector Innovations) The Portrait of Community Empowerment in Tamansari Village , Banyuwangi , in the Context of Policy and Social Innovation. 8(1), 1–11.
- Sarjiyanto, Sarwoto, & Darma, S. T. (2022). The Sustainability of Community Empowerment as Development Strategies: The Experience of Indonesia. *The Sustainability of Community Empowerment as Development Strategies: The Experience of Indonesia*, 9(3), 207–218.
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi

- Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi Di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). Publika, 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894>
- Setiawan, A., & Ikbal, George Towar. (2019). Inovasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanian Melalui Aplikasi. Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional, 1(1), 1–20.
- Sofianto, A. (2020). Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Matra Pembaruan*, 4(2), 93–107. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.93-107>
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- Sutikno, C., Atika, Z. R., Wijaya, S. S., & Mujib, M. (2022). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyumas: Model Pergeseran Paradigma Pengelolaan Potensi Desa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i2.3143>
- Sutikno, C., Atika, Z. R., Wijaya, S. S., & Mujib, M. (2022). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Srowot Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i3.3427>
- Hidayat, A., Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., & Milata, C. I. (2025). Manajemen Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Bukit Pongan Indah di Desa Karang Gintung Kabupaten Banyumas. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 123–140. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6828>

Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang RI nomor 6 tahun 2014. (2016). *UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. 4(1), 1–23.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun, I. (2002). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4219,